



Sengketa Rp3,1 Miliar, Aset Kepala Desa Temandang Kini Masuk Tahap Konstatering

kabartuban.com - Pengadilan Negeri (PN) Tuban melakukan konstatering atau pencocokan objek sengketa di Desa Temandang, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Kamis (9/9/2026). Proses tersebut menjadi salah satu tahapan sebelum pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

Konstatering dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara objek yang diajukan dalam permohonan eksekusi dengan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk terkait letak, batas, serta status kepemilikan objek.

Dalam perkara ini, objek yang diajukan untuk proses eksekusi berupa rumah tinggal dan gudang yang berada di wilayah Desa Temandang.

Berdasarkan penetapan Ketua PN Tuban tertanggal 14 Agustus 2026, proses konstatering tersebut berkaitan dengan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

telah melalui sejumlah tahapan upaya hukum.

Perkara tersebut sebelumnya bergulir di PN Tuban, kemudian berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, kasasi di Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali (PK).

Pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 2672 K/Pdt/2021 tertanggal 6 Oktober 2021, permohonan kasasi para termohon, yakni PT Menara Mas Persada, Tinik yang disebut juga sebagai Kepala Desa Temandang, serta Mus-ta'in, ditolak.

Selanjutnya, melalui Putusan Nomor 1078 PK/Pdt/2022 tertanggal 8 November 2022, permohonan peninjauan kembali juga ditolak.

Dengan adanya putusan tersebut, perkara telah berkekuatan hukum tetap dan memasuki tahapan pelaksanaan putusan. Juru Bicara PN Tuban, Andi Ahsanal Zamakhsyari,

menjelaskan konstatering merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum pengadilan menentukan pelaksanaan eksekusi.

Menurutnya, setelah sebuah perkara memiliki kekuatan hukum tetap dan terdapat permohonan eksekusi, pengadilan tidak serta-merta langsung melakukan eksekusi. Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilakukan.

Salah satunya adalah konstatering, yakni mencocokkan objek yang tercantum dalam permohonan eksekusi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

"Konstatering itu bahasa Indonesianya pencocokan. Jadi pengadilan menilai apakah objek yang dimohonkan eksekusi ini bisa dilaksanakan eksekusinya," jelas Andi.

Ia menegaskan, kegiatan yang dilakukan....

[Baca Selengkapnya....](#)

Kemarau Meluas, BPBD Tuban Tangani Krisis Air Bersih di 18 Desa

kabartuban.com - Kemarau kali ini tak sekadar membuat tanah di sejumlah wilayah Kabupaten Tuban mengering. Persediaan air bersih warga juga mulai menipis. Di tengah musim yang diperkirakan masih berlangsung hingga November, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban kini harus memperluas jangkauan distribusi air bersih.

Terbaru, 18 desa yang tersebar di sembilan kecamatan tercatat masuk dalam penanganan BPBD karena mengalami kondisi rawan air bersih. Jumlah tersebut bertambah dari pekan sebelumnya yang masih mencapai 15 desa.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tuban, Sudarmaji, mengatakan Pasokan difokuskan pada sejumlah dusun atau wilayah yang memang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

"Sekarang kita dropping air untuk 15 desa. Tapi bukan berarti seluruh wilayah desa, hanya sebagian wilayah desa yang memang rawan air bersih," kata Sudarmaji, Senin (7/9/2026).

Sembilan kecamatan yang masuk dalam data penanganan tersebut meliputi Grabagan, Parengan, Senori, Jatirogo, Bancar, Semanding, Montong, Bangilan, dan Soko.

Di tengah kebutuhan yang terus bergerak, BPBD tidak setiap hari mengirimkan air ke desa yang sama. Distribusi dilakukan dengan sistem jeda agar pasokan dapat dibagi ke wilayah lain yang juga membutuhkan.

"Tidak setiap hari. Kita jeda sehari karena harus berbagi dengan....

[Baca Selengkapnya....](#)





Warga Keluhkan Bau Menyengat, Pemdes Socorejo Desak Penjelasan PT IMB

kabartuban.com – Malam di Dusun Soco, Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, pada 5 September 2026, terasa berbeda. Sejumlah warga mengeluhkan munculnya bau menyengat yang mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat.

Keluhan tersebut kemudian mengalir dari warga kepada Kepala Dusun Soco, Aan, sebelum diteruskan kepada Pemerintah Desa Socorejo. Kemunculan bau itu selanjutnya menjadi perhatian Pemdes, terlebih karena wilayah tersebut berada di sekitar kawasan industri.

Pemerintah Desa Socorejo meminta manajemen PT Indo Mina Bahari (IMB) memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber bau yang dirasakan warga.

Pemdes menilai, ketika terjadi kondisi tidak normal di lingkungan sekitar kawasan industri, masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Kepala Desa Socorejo, Z. Arief Rahman Hakim, mengatakan pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan sumber maupun dampak dari bau tersebut. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan verifikasi pihak yang memiliki kewenangan.

Namun, kata Arief, perusahaan tetap perlu membuka komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

“Kami mendukung investasi, tetapi jangan sampai masyarakat yang tinggal....

[Baca Selengkapnya....](#)

Kecelakaan Beruntun di Jalan Soekarno-Hatta Tuban Tewaskan Satu Orang

kabartuban.com – Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Kamis (10/9/2026) sore. Insiden tersebut mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Tuban Ipda Rizki DP, mengungkapkan bahwa Kecelakaan terjadi sekitar pukul 14.45 WIB. Peristiwa bermula ketika mobil Toyota Kijang Innova bernopol S 1817 EW yang dikemudikan Muhammad Abdul Wahib (32), warga Kecamatan Jenu, melaju dari arah utara menuju selatan.



Saat berada di persimpangan, kendaraan tersebut diduga tetap melaju ketika lampu lalu lintas menyala merah.

Pada saat bersamaan, sepeda motor Honda Vario bernopol S 5979 IS yang dikendarai Wahyu Bagus Pambudi, berboncengan dengan Amalya Umami Nahdiah (25), melaju dari arah timur dan berbelok ke kanan menuju utara.

Benturan pun tak terhindarkan. Honda Vario tersebut kemudian terpental dan mengenai mobil Suzuki AKN bernopol B 2028 KIE yang dikemudikan Diana Setiawati (54) dengan penumpang Tiara Anggrini (27).

Kecelakaan berlanjut ketika mobil Innova tersebut kembali terlibat benturan dengan sepeda motor Honda Beat bernopol S 3826 EAQ yang dikendarai Moch Nisfu Ramadhan Putra (30). Sepeda motor tersebut diketahui melaju dari arah timur dan hendak berbelok ke kiri menuju selatan.....

[Baca Selengkapnya....](#)





Tiga Pejabat Kejari Tuban Dikabarkan Kembali Bertugas, AMPH Gelar Aksi Penolakan

kabartuban.com - Bola panas kasus dugaan rasuah dalam penanganan perkara tambang ilegal dengan terdakwa CK di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban masih membara. Kabar mengenai rencana kembalinya tiga pegawai Kejari Tuban yang diduga menerima aliran dana dalam perkara tersebut memicu aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) di depan Kantor Kejari Tuban, Jumat (11/9/2026).

Dalam aksinya, massa dengan tegas menolak tiga pejabat kejaksaan yang disebut-sebut akan kembali bertugas di lingkungan Kejari Tuban.

Ketiga pejabat tersebut yakni Kasubbag Pembinaan Fahrudin, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Akhmad Akhsan, serta Kepala Subseksi Pra Penuntutan Seksi Pidum M. Ubab Shohibul Mahali.

Kabar mengenai kemungkinan kembalinya ketiga pejabat tersebut sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Tuban, Stephen Dian Palma.

Koordinator aksi, Jatmiko, mengatakan pihaknya mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuban, Ujang Sutisna, menolak penempatan tiga pejabat terse-

but apabila benar kembali ditugaskan di Tuban.

"Kenapa kami mengatakan sedang bermasalah, karena jelas teman-teman juga tahu dari pemberitaan kemarin, bahwa mantan Kajari Tuban, Supardi, dan juga ada inisial EDP itu juga sudah dipastikan mutasi. Supardi juga sudah dicopot. Tapi kenapa yang tiga ini harus akan dikembalikan lagi?" ujar Jatmiko.

Menurut Jatmiko, Kejari Tuban seharusnya diisi oleh pejabat yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi keadilan. Sebab, kejaksaan merupakan salah satu institusi yang menjadi tem-

pat masyarakat mencari keadilan.

Ia menegaskan, apabila tiga pegawai tersebut tetap ditempatkan di Kejari Tuban, pihaknya tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi.

"Melihat fenomena seperti ini, upaya kami menggelar aksi dan bersurat, juga meminta keterangan secara resmi. Mungkin kami akan turun aksi lagi sebagai bentuk penolakan kami. Karena beliau Pak Kajari punya hak untuk menolak jaksa yang bermasalah," tegasnya.

[Baca Selengkapnya....](#)



Warga Geruduk PT IMB Tuban, Desak Transparansi soal Bau Limbah dan Dugaan Kecelakaan Kerja

kabartuban.com - Bau menyengat yang disebut warga berasal dari aktivitas PT Indo Mina Bahari (IMB) Tuban kembali memantik keresahan. Puncaknya, sejumlah warga Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, mendatangi dan memblokade akses masuk perusahaan pada Rabu pagi (9/9/2026).

Kedatangan warga bukan hanya untuk mempersoalkan bau yang dinilai mengganggu, tetapi juga mendesak perusahaan lebih terbuka terkait aktivitas di dalam kawasan pabrik, termasuk informasi mengenai kecelakaan kerja yang menurut pemerintah desa selama

ini tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada pihak terkait.

Situasi sempat memanas ketika warga menyampaikan berbagai keluhan kepada pihak perusahaan. Akses masuk pabrik pun diblokade warga hingga akhirnya perwakilan PT IMB menemui mereka.

Kepala Desa Socorejo, Zubas Arief Rahman Hakim, mengatakan aksi tersebut merupakan akumulasi keresahan warga. Menurutnya, persoalan bukan hanya mengenai bau, melainkan juga minimnya keterbukaan....

[Baca Selengkapnya....](#)



13 Pekerja Lokal Terjepit Pergantian Vendor PLTU Tanjung Awar-Awar, DPRD Kecewa PLN Mangkir Mediasi

kabartuban.com - Pergantian vendor di PT PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkit (UP) PLTU Tanjung Awar-Awar menyisakan persoalan bagi 13 pekerja lokal. Di tengah aktivitas bongkar muat batu bara yang tetap berjalan, mereka justru menghadapi ketidakpastian status kerja dan perubahan skema upah.

Para pekerja mengaku belum mendapatkan kepastian untuk kembali bekerja dengan status dan pola pengupahan seperti sebelumnya setelah pekerjaan alih daya beralih kepada vendor baru, PT Surveyor Indonesia, mulai 1 September 2026.

Persoalan tersebut kemudian dibawa ke DPRD Tuban. Para pekerja meminta kepastian

agar pergantian vendor tidak membuat mereka kehilangan pekerjaan, terlebih jenis pekerjaan yang selama ini mereka jalankan masih tersedia.

Keluhan itu kemudian ditindaklanjuti Komisi II DPRD Tuban melalui forum mediasi yang mempertemukan perwakilan pekerja, PT Surveyor Indonesia, dan pihak PLTU Tanjung Awar-Awar.

Namun, forum tersebut justru berakhir tanpa kesepakatan. Pihak PLN Nusantara Power selaku pemberi kerja tidak hadir dalam agenda yang telah dilayangkan melalui undangan resmi DPRD Tuban.

Ketidakhadiran tersebut membuat Ketua Ko-

misi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, kecewa. Ia menilai ketidakhadiran PLN tanpa penjelasan telah menghambat upaya mencari jalan keluar atas persoalan yang menyangkut nasib pekerja lokal.

“PLN Nusantara Power selaku pemberi kerja justru mangkir dari undangan kami tanpa memberikan alasan. Ini bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD,” tegas Fahmi usai rapat.

Tidak hanya PLN, General Manager PT Surveyor Indonesia selaku vendor baru juga tidak hadir. Perusahaan hanya mengirimkan perwakilan yang menurut DPRD tidak...

[Baca Selengkapnya...](#)

Dari Curhat ke Rp450 Juta: Kuasa Hukum EDP Ungkap Versi Lain Dugaan Suap Kejari Tuban

kabartuban.com - Polemik dugaan suap dalam penanganan perkara tambang ilegal yang menyeret sejumlah pejabat dan jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban kembali memanas.

Kali ini, kuasa hukum Erma Dwi Puspitasari (EDP) angkat bicara. Mereka membantah kabar yang menyebut kliennya memberikan suap sebesar Rp600 juta kepada pihak Kejari Tuban.

Dalam konferensi pers di Resto Grand Javanila, Kamis (10/9/2026), kuasa hukum EDP, Adi Salim dari Salim Law Office Associates Surabaya, justru menyampaikan versi berbeda. Menurutnya, EDP bukan pihak yang menginisiasi pemberian uang, melainkan berada dalam posisi dimintai sejumlah uang terkait penanganan perkara kasus tambang ilegal dengan terdakwa CK.

“Kami membantah telah melakan suap sebesar Rp600 juta kepada pihak Kejaksaan Negeri Tuban. Justru berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada kami, posisi EDP adalah pi-

hak yang dimintai sejumlah uang,” kata Adi.

Ia menyebut, angka yang disampaikan kliennya bukan Rp600 juta sebagaimana rumor yang beredar, melainkan Rp450 juta.

Menurut versi kuasa hukum, persoalan tersebut bermula ketika EDP curhat dengan Kepala Kejari Tuban yang saat itu, Supardi. EDP disebut tengah mencurahkan persoalan hukum yang dihadapi rekan bisnisnya, CK.

Dari komunikasi tersebut, menurut Adi, kemudian muncul tawaran untuk membantu penanganan perkara CK yang disertai dugaan permintaan sejumlah uang.

Adi juga mengklaim terdapat pembicaraan mengenai penghentian perkara CK pada tahap P19 dan janji tuntutan yang lebih ringan.

“Berdasarkan keterangan yang kami terima, ada tawaran agar perkara tersebut berhenti di

[Baca Selengkapnya...](#)

